
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 2 NO 2
JULI 2016

Jurnalakuntansi.lp3ibdg@gmail.com

PENERAPAN AUDIT INDEPENDEN DAN POLA PEMBINAAN PADA BKM UNTUK MENGEFEKTIFKAN PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PERKOTAAN DI KOTA BANDUNG

Luh Gede Maya Untari Wiwaha – Oversight Consultan (OC) 4 Reg JABAR (maya.untari@yahoo.com)

ABSTRACT

National Program for Community Empowerment or PNPM Urban MP is the realization of government policy that seeks to reduce poverty and ultimately creating a civil society. But so far there are still obstacles in the implementation of the program, including the issue of performance accountability Community Self-reliance Agency (BKM). The research problem is formulated as follows: 1) how BKM response to the presence of an independent auditor?, 2) how the implementation of an independent audit based on the pattern of development in Bandung BKM?, 3) whether the application of the independent audit based development patterns can improve the accountability in the performance of BKM Bandung district?, 4) how the implementation of PNPM MP in Bandung district?, 5) whether an independent audit based on the coaching pattern can streamline BKM PNPM MP in Bandung district?. The study was conducted with the purpose: want to know and analyze the response to the presence of an independent auditor BKM, application independent audit based on the pattern of development in Bandung BKM and answer patterns in the formation of an independent audit is conducted to improve the accountability of performance BKM in Bandung. And determine and analyze the implementation of PNPM MP in Bandung and independent audit based on the coaching pattern can streamline BKM whether PNPM MP in Bandung. The research method uses a descriptive qualitative design of the data collection and in-depth interviews gradual (in-depth interviews), observation and documentation. It is therefore necessary to create a positive assumption of the existence of the auditor is working pattern of an audit. Here the role of the independent auditor who can be expected to change the negative assumptions, because the independent auditor is not bound by government intervention. The task of the independent auditors should not only look for finding problems, but also there is a mission coaching so BKM know how to properly make a true report according to standard. Pattern formation is conducted by an independent auditor aims not only to provide knowledge and understanding of that report generation accountable according to the standard, but it is expected to provide intrinsic motivation so that future auditing of BKM has awareness for its own performance. Performance accountable BKM will have an impact on the effectiveness of the implementation of PNPM MP. Study to improve performance accountability system that BKM MP PNPM actors in implementing PNPM MP.

Keywords: PNPM MP, Independent Audit, coaching, accountability

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebijakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat merupakan wujud riil kepedulian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan negara Indonesia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan dan kemakmuran dapat tercapai apabila semua masyarakat Indonesia ini sudah merasakan secara merata kesejahteraannya, mempunyai kesamaan untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama maupun kesamaan untuk dapat hidup dan mendapatkan pekerjaan secara layak.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) adalah realisasi kebijakan pemerintah yang mempunyai misi membangun masyarakat mandiri (yang pada akhirnya mampu menjadi masyarakat madani), yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dalam tatanan good governance, serta mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan (neighbourhood development) (Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, 2010).

Dalam kerangka optimalisasi program PNPM-MP, maka sangat penting sekali untuk dilakukan pengembangan kapasitas bagi setiap pelaku ditingkat desa didalam setiap pelaksanaan siklus PNPM-MP, sehingga siklus PNPM-MP dapat dijalankan secara optimal sebagai sarana pembelajaran masyarakat di dalam internalisasi nilai nilai luhur kemanusiaan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak, terutama kepentingan masyarakat miskin, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif dan demokratis. Selanjutnya dalam tiap langkah kegiatan dilakukan secara partisipatif, melibatkan segenap komponen masyarakat, khususnya kelompok masyarakat rentan yang selama ini tidak memiliki peluang dalam program dan kegiatan setempat, sehingga mampu membangun rasa kepemilikan dan proses belajar melalui mekanisme bekerja sama.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung dengan PNPM-MP, dalam pelaksanaannya dikelola oleh BKM di masing-masing kelurahan beserta Unit Pengelolaannya. Dalam mengatur semua pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk seluruh kegiatan yang meliputi Unit Kegiatan Fisik/Lingkungan, Kegiatan Sosial dan Kegiatan Ekonomi Bergulir juga Kegiatan Operasional lainnya.

Sebagai perwujudan bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola hal tersebut diatas, maka adanya Laporan Keuangan yang transparan juga Akuntabilitas yang sesuai dengan standar akuntansi, prinsip juga nilai-nilai kemanusiaan seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan masing masing yang sudah di legalisasi oleh Notaris.

Namun sejauh ini masih saja ditemukan kendala terhadap pelaksanaan PNPM-MP. Kendala-kendala tersebut seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PNPM-MP sehingga masih saja ada anggapan bahwa dana pemerintah adalah dana hibah akibatnya tak jarang timbul kredit macet dalam praktek pemberdayaan program ekonomi. Kendala lainnya adalah masalah akuntabilitas dari pelaku PNPM yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Agar akuntabel kinerja BKM peran auditor baik inspektorat, BPK maupun auditor independen dibutuhkan dalam hal ini. Akan tetapi keberadaan auditor sejauh ini sepertinya masih diasumsikan sebagai sebuah badan investigator yang menjadi momok dan menakutkan bagi para BKM, sehingga akuntabilitas yang seharusnya muncul dari motivasi intrinsik terkesan muncul karena dorongan adanya auditor semata. Mereka melakukan akuntabilitas terhadap kinerjanya seolah-olah hanya karena akan diaudit, sehingga kalau tidak dilaksanakan pertanggungjawaban tersebut dampaknya dana bergulir juga tidak akan diterima lagi.

Oleh karena itu yang dibutuhkan untuk menciptakan asumsi positif terhadap keberadaan auditor adalah pola kerja dari seorang audit. Auditor jangan lagi menimbulkan kesan menakutkan yang dapat berimbas pada aspek psikis pada para BKM. Peran auditor independen dalam hal ini yang bisa diharapkan untuk merubah asumsi negatif tersebut, karena seorang auditor independen tidak terikat oleh intervensi pemerintah. Tugas auditor independen seyogyanya tidak hanya melakukan audit/investigasi mencari temuan-temuan persoalan dalam pelaksanaan PNPM-MP saja, melainkan juga ada misi pembinaan sehingga para BKM mengetahui bagaimana semestinya membuat laporan yang benar sesuai standart dan mengetahui juga sejauhmana kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi sejauh ini masih saja ditemukan kendala terhadap pelaksanaan PNPM-MP. Kendala-kendala tersebut seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PNPM-MP sehingga masih saja ada anggapan bahwa dana pemerintah adalah dana hibah akibatnya tak jarang timbul kredit macet dalam praktek pemberdayaan program ekonomi. Kendala lainnya adalah masalah akuntabilitas dari pelaku PNPM yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Agar akuntabel kinerja BKM peran Konsultan Manajemen dalam mengawal pelaporan penggunaan dana dari pemerintah dari APBD maupun APBN sangat diperlukan. Akan tetapi keberadaan fasilitator sejauh ini sepertinya masih kurang, oleh karena itu diperlukan pelatihan khusus unit pengelolaan pada BKM di masing-masing desa oleh akuntan pendidik sekaligus audit. Tujuannya memahamkan kepada pelaku kegiatan, agar melakukan pembukuan secara akuntabilitas terhadap kinerjanya. Oleh karena itu yang dibutuhkan mekanisme penyusunan standar harus diatur sesuai dengan prinsip dan nilai BKM.

Melalui pola pembinaan yang dilakukan oleh akuntan pendidik bertujuan bukan hanya memberikan pengetahuan dan pemahaman pembuatan laporan yang akuntabel sesuai standar akuntansi yang berlaku, namun lebih dari itu diharapkan untuk menghindari penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan dana PNPM-MP, maka perlu diadakan pembinaan yang didalamnya meliputi kegiatan monitoring, supervisi dan evaluasi oleh masyarakat, auditor independen dan pihak yang berkewajiban lainnya terhadap alur keuangan di BKM selaku pengelola dana.

Kota Bandung masuk dalam Oversight Consultant (OC) 4 Regional Jawa Barat merupakan salah satu pelaksana Konsultan Wilayah yang ada di Pulau Jawa. Di Kota Bandung ini terdapat 151 Kelurahan yang sampai saat ini sedang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dengan dana PNPM-MP. Maka di perlukan pembinaan pelaporan

keuangan agar kendala-kendala pelaksanaan PNPM-MP yang seringkali dihadapi dapat dibukukan secara akuntabilitas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola pembinaan pelaporan keuangan yang diinginkan BKM ?
2. Bagaimanakah penerapan standar akuntansi pada BKM di Kota Bandung?
3. Apakah PNPM-MP sudah menerapkan laporan keuangan yang berbasis standar akuntansi?
4. Apakah pembinaan pelaporan keuangan pada BKM dapat PNPM-MP di Kota Bandung dapat sesuai dengan standar akuntansi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis respon BKM terhadap keberadaan auditor independen.
2. Mengetahui dan menganalisis penerapan audit independen yang berbasis pola pembinaan pada BKM di Kota Bandung.
3. Menjawab pola pembinaan yang dilakukan dalam audit independen apakah dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja BKM di Kota Bandung.
4. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PNPM-MP di Kota Bandung.
5. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan audit independen yang berbasis pola pembinaan pada BKM apakah dapat mengefektifkan PNPM-MP di Kota Bandung.
6. Kajian untuk memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja pelaku PNPM-MP yaitu BKM dalam menjalankan program-program PNPM-MP.

LANDASAN TEORI

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP)

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang dihadapi oleh negara Indonesia. Persoalan kemiskinan apabila tidak segera ditanggulangi akan berdampak pada persoalan sosial lainnya, seperti pengangguran, timbulnya pengemis dan gelandangan, kriminalitas bahkan dapat berakibat pada krisis moral. Sebagai konsekuensi dari persoalan kemiskinan akan berdampak pula pada persoalan pemerintahan. Pemerintahan akan bisa hancur apabila masyarakat miskin melakukan protes sikap karena tidak dapat lagi menahan kemiskinannya. Untuk mengatasi hal tersebut, sejak Pelita III pemerintah sudah melaksanakan strategi pembangunan yang memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dari pembangunan (Tambunan, 2003:83). Strategi tersebut mulai dari Inpres Desa Tertinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan rumah tangga di pedesaan sampai Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP).

PNPM-MP adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan (Sie Infokum Ditama Binbangkum, 2011).

Secara umum tujuan dari PNPM-MP adalah menanggulangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin supaya menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Untuk mencapai tujuan program, PNPM MP menekankan pada prinsip-prinsip dasar (Sie Infokum Ditama Binbangkum, 2011) sebagai berikut:

1. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM-MP senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM-MP masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
3. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
4. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan untuk mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
6. Kesenjangan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan;
7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
8. Transparansi dan Akuntabel. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif
9. Prioritas. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
10. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerja sama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan;
11. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan Kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan
12. Sederhana. Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

Agar pelaksanaan PNPM-MP dapat berjalan efektif dan tepat sasaran telah dilakukan penguatan kelembagaan pada pelaku PNPM di pedesaan baik pada BKM/LKM maupun KSM. Hal ini dilakukan mengingat hasil identifikasi sebagaimana yang disampaikan dalam penelitian dari Puslitbang Kementrian Pekerjaan Umum (2011) memperlihatkan bahwa PNPM MP dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan masih menghadapi beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Permasalahan tersebut adalah antara lain karena dinamika sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat Indonesia menghasilkan variasi dan karakteristik masyarakat yang

berbeda-beda. Di satu sisi menghasilkan masyarakat yang fatalis (pasrah pada nasib), disisi yang lain, menghasilkan masyarakat pejuang (fighting spirit yang tinggi). Kondisi tersebut terkesan diabaikan dan belum terakomodasi dalam perencanaan program. Oleh karena itu dilakukan penguatan kelembagaan masyarakat yang bertujuan menciptakan kemandirian dan keberkelanjutan kemampuan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan berkaitan dengan kebijakan publik di tingkat lokal, baik aspek sosial, ekonomi maupun lingkungan termasuk perumahan dan permukiman. Arah akhir dari penguatan kelembagaan pada pelaku PNPM-MP (BKM/Badan Keswadayaan Masyarakat) tersebut adalah pada peningkatan kinerja BKM.

Audit Independen

Audit merupakan alat mekanisme kontrol terhadap pengelolaan dan pelaporan keuangan organisasi. Sebagaimana dikatakan oleh Wijayanto (2012:232) yang lebih menekankan pengertian audit pada audit keuangan (auditing), yaitu proses penilaian untuk memverifikasi dan memvalidasi kejujuran dan akurasi laporan keuangan dari organisasi sebagai dasar untuk pembuatan keputusan bagi pihak manajemen.

Berdasarkan pengertian di atas, didapatkan manfaat pengauditan (Halim, 2008:62) adalah untuk: 1) meningkatkan kredibilitas perusahaan, 2) meningkatkan efisiensi dan kejujuran, 3) meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan 4) mendorong efisiensi pasar modal. Ketiga manfaat audit tersebut pada tingkatan makro dapat memberikan dampak positif pada perusahaan khususnya terkait dengan laporan keuangan yang berkualitas, relevan dan handal.

Menurut Jusup (2001:15-16) audit pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 golongan yaitu:

1. Audit laporan keuangan, yaitu audit yang dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan sebagai keseluruhan informasi kuantitatif yang akan diperiksa dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang diperiksa meliputi neraca, laporan rugi laba dan laporan arus kas termasuk catatan kaki (footnotes).
2. Audit kesesuaian, yaitu audit untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.
3. Audit operasional, yaitu audit yang berupa pengkajian (review) atas setiap bagian dari prosedur dan metode yang diterapkan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas. Hasil akhir dari audit operasional biasanya berupa rekomendasi kepada manajemen untuk perbaikan operasi.

Berdasarkan penggolongan audit di atas, terdapat 3 jenis auditor (orang yang melaksanakan tugas pengauditan) menurut Jusup (2001:17) yaitu:

1. Auditor pemerintah, adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah.
2. Auditor internal, adalah auditor yang bekerja pada suatu organisasi dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada organisasi tersebut.
3. Auditor independen atau akuntan publik, adalah auditor yang melaksanakan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh organisasi.

Auditor pelaksanaan PNPM-MP dilakukan oleh auditor internal yaitu Asisten Kota (Askot) dan Koordinator Kota (Korkot) berdasarkan penilaian kinerja yang dilakukan oleh tim fasilitator. Sedangkan auditor eksternal dilakukan oleh auditor independen dan auditor pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) dan

inspektorat keuangan. Tugas auditor disini adalah untuk mengukur kinerja pembukuan dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pengukuran kinerja pada BKM bertujuan: (1) memastikan seluruh kebijakan keuangan di tingkat BKM telah ditetapkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BKM, (2) memastikan seluruh transaksi keuangan telah dilakukan sesuai dengan prinsip dasar manajemen keuangan, (3) memastikan seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan tepat waktu dan layak dan (4) memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan sehingga dapat ditunjukkan kepada pemberi dana dan penerima manfaat bahwa aset organisasidigunakan sebagaimana seharusnya (Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2011:27).

Manajemen Efektif Berbasis Pola Pembinaan

Suatu organisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya pengelolaan yang efektif. Pengelolaan yang efektif tidak hanya dilihat dari tercapainya tujuan organisasi saja, melainkan juga harus dilihat dari tepatnya waktu pelaksanaan tugas/pekerjaan dalam organisasi maupun efisiensinya biaya yang dikeluarkan. Madura (2009:383) menyatakan bahwa manajemen efektif mempersyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menuntut tanggung jawab pekerjaan diberikan secara tepat dalam struktur organisasi. Idealnya struktur organisasi memungkinkan dilakukannya pengendalian atas setiap pemberian pekerjaan sehingga seluruh jenis tugas dapat diawasi.
2. Adanya proses produksi yang efisien
3. Adanya usaha untuk secara terus menerus untuk meningkatkan mutu dari setiap produk yang dihasilkan.

Persyaratan yang disampaikan oleh Madura (2009) di atas menjelaskan bahwa pengelolaan yang efektif membutuhkan tingkatan dalam manajemen untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan dapat diselesaikan. Tingkatan manajemen tersebut meliputi manajemen puncak (top management), yaitu manajemen yang berperan dalam pengambilan keputusan jangka panjang, seperti direktur utama, direktur, presiden. Tingkatan kedua adalah manajemen tingkat menengah (middle management), yaitu manajemen yang mempunyai tugas memecahkan masalah dan mencari metode-metode baru untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan tingkatan bawah adalah manajemen supervisor (low management). Manajemen ini sangat terlibat dengan aktivitas proses produksi sehari-hari yang dilakukan oleh karyawan.

Selain perlunya tingkatan manajemen untuk menyelesaikan tugas, pengelolaan yang efektif juga membutuhkan manajemen waktu untuk menyelesaikan proses produksi yang efisien. Manajemen waktu yang efektif menurut Madura (2009:419) dapat dilakukan dengan cara menyusun prioritas dengan tepat berdasarkan apa yang terbaik bagi perusahaan, menjadwalkan interval waktu yang panjang untuk pekerjaan-pekerjaan penting, meminimalisasi gangguan, membuat tujuan-tujuan jangka pendek dan mendelegasikan sebagian pekerjaan kepada karyawan.

Oleh karena manfaat pengauditan difokuskan pada peningkatan kualitas laporan keuangan, maka manajemen yang dibangun untuk mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas adalah berbasis pada pola pembinaan. Manajemen berbasis pola pembinaan dapat dilakukan oleh auditor internal organisasi yang bersangkutan maupun auditor independen sejauh tidak menyalahi aturan-aturan yang memang harus diembannya.

Pola pembinaan pada kegiatan manajemen merupakan kegiatan menjalankan fungsi pengarahan (directing). Pengarahan sendiri menurut Sumarni dan J. Soeprihanto (2000:152) merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi melakukan kegiatan yang sudah ditentukan kearah tercapainya tujuan. Kegiatan pengarahan ini banyak menyangkut masalah pemberian motivasi kepada para anggota organisasi, kepemimpinan serta pengembangan komunikasi. Oleh karena itu terkait pemberian motivasi ini diharapkan bisa dilakukan oleh seorang auditor independen dalam bentuk pembinaan yang dilakukan pada para Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) selaku pelaku PNPM-MP.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini berupaya untuk menganalisis respon BKM terhadap keberadaan auditor independen dan menganalisis penerapan audit independen yang berbasis pola pembinaan apakah dapat memperbaiki akuntabilitas kinerja BKM di Kota Bandung. Dan menganalisis pelaksanaan audit independen yang berbasis pola pembinaan pada BKM apakah dapat dapat mengefektifkan PNPM-MP di Kota Bandung.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung dengan mengambil sampel 2 kecamatan yang dikategorikan dalam 2 kategori yaitu kecamatan yang sudah lama mendapatkan dan mengelola program PNPM-MP yaitu Kecamatan Coblong dan Kecamatan Cidadap. Dipilihnya 2 kecamatan tersebut dengan kategori yang berbeda mengingat ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan pengauditan. Pengauditan pola lama diasumsikan jauh dari adanya unsur pola pembinaan sedangkan pengauditan yang sekarang sudah ada pola pembinaan dari auditor independen.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah para BKM yang mengelola dana PNPM-MP terdiri dari koordinator, sekretaris dan unit pengelola yang diambilkan dari 2 Kecamatan dengan masing-masing Kecamatan Coblong terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cidadap terdiri dari 3 Kelurahan. Sehingga koordinator dan sekretaris BKM yang diinterview diambilkan dari 9 Kelurahan dari 2 Kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian. Selain itu interview juga dilakukan pada senior fasilitator dari kedua kecamatan tersebut maupun pada auditor independen yang mewakili dari kedua kecamatan yang menjadi lokasi penelitian.

Subyek penelitian juga dilakukan melalui interview pada senior fasilitator, auditor independen maupun coordinator, sekretaris BKM dan unit pengelola pada 9 Kelurahan di Kecamatan Coblong dan Cidadap untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PNPM-MP melalui audit independen dan berbasis pola pembinaan.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh melalui metode :

1. Observasi

Pengamatan langsung akan dilakukan pada obyek penelitian yaitu kelurahan-kelurahan yang dijadikan lokasi penelitian maupun subyek penelitian yaitu para senior fasilitator

sebagai pendamping kegiatan PNPM-MP maupun para BKM yaitu koordinator, sekretaris dan unit pengelola sebagai pengelola dana PNPM-MP.

2. Interview

Depth interview atau wawancara mendalam dengan didasarkan pada pedoman wawancara yang telah dibuat sesuai dengan kajian penelitian akan dilakukan kepada subyek penelitian.

3. Dokumentasi

Ini dilakukan dengan mengambil dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pelaku PNPM-MP d 2 kecamatan yang menjadi lokasi penelitian.

Teknik Analisis Data

Data pada penelitian akan dianalisis secara kualitatif berupa narasi atas hasil penelitian.

1. Dianalisis data tentang respon BKM terhadap keberadaan auditor independen dan penerapan audit independen yang berbasis pada pola pembinaan terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja BKM di Kota Bandung.
2. Dianalisis data tentang pelaksanaan audit independen yang berbasis pola pembinaan pada BKM dalam mengefektifkan PNPM MP di Kota Bandung.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Audit Independen di BKM - PNPM Mandiri Perkotaan

BKM selaku Badan Keswadayaan Kelurahan yang dibentuk oleh Masyarakat memiliki tanggung jawab kunci meliputi, menjamin asset organisasi selalu digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menjamin catatan administrasi dan pembukuan dilakukan dengan baik dan benar. Laporan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menjamin Sistem dan Prosedur keuangan yang ada dalam organisasi selalu ditaati, dan bila ada ketidak sesuaian akan dilaporkan secara transparan.

BKM memiliki kewajiban untuk melaksanakan audit terhadap setiap pengelolaan keuangannya, sebagai bentuk pelaksanaan pembelajaran Transparansi dan Akuntabilitas, sebagai pilar ke Empat, dalam konsep transformasi social masyarakat menuju Masyarakat Madani, Laporan Hasil Audit (LHA) oleh Auditor Independen yang harus dipublikasikan oleh BKM sebagai bagian dari proses transparansi dan akuntabilitas. Publikasi atas LHA dapat dilakukan di Media Massa, didokumentasikan pada Laporan Tahunan BKM, serta minimal ditempel di 5 titik strategis. BKM dalam melaksanakan Audit Independen, harus sudah direncanakan sehingga pembiayaannya telah dianggarkan dalam BOP BKM. Untuk itu perlu adanya audit Independen yang diajukan oleh BKM melalui FKA Kota kepada Kantor Akuntan Publik.

Oleh karena itu dalam proses manajemen organisasi masyarakat harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat belajar dan “Melembagakan” sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakannya. Dalam proses pengambilan keputusan yang langsung menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat agar dilakukan sedekat mungkin dengan pemanfaat pada masyarakat sendiri, sehingga keputusan yang dibuat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat banyak. Yang dapat bernilai sesuai dengan pasal 4 tentang nilai BKM yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dapat dipercaya atau amanah
Dalam melaksanakan kegiatan harus benar-benar dapat menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat
2. Ikhlas atau kerelawanan
Dalam melaksanakan kegiatan benar-benar berlandaskan niat ikhlas untuk turut memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin yang ada diwilayahnya, dan tidak mengharapkan imbalan materi, jasa, maupun mengutamakan kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya
3. Kejujuran
Dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan harus dilakukan dengan jujur, sehingga tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk merekayasa, memanipulasi maupun menutup-nutupi sesuatu yang dapat merugikan masyarakat miskin serta menyimpang dari visi, misi dan tujuan penguyuban
4. Keadilan
Dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan harus menekankan azas keadilan, kebutuhan nyata dan kepentingan masyarakat miskin
5. Kesetaraan
Dalam pelibatan masyarakat pada pelaksanaan dan pemanfaatan dana yang dimiliki penguyuban, tidak membedakan latar belakang, asal-usul, agama, status, jenis kelamin dan lain-lainnya
6. Kebersamaan dalam keragaman
Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan perlu dioptimalkan gerakan masyarakat, sehingga kemiskinan benar-benar menjadi urusan semua masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, mata pencaharian, budaya, pendidikan dan sebagainya, bukan hanya menjadi urusan dari masyarakat miskin atau sekelompok elit saja.

Penerapan Audit Independen berbasis pola pembinaan pada BKM

Auditor diharapkan memberikan keyakinan secara independen atas akuntabilitas penggunaan dana oleh BKM/LKM beserta Unit Pengelola dan pihak pelaksana kegiatan, termasuk kepatuhan terhadap peraturan PNPM yang berlaku, anggaran dasar BKM/LKM, pengendalian internal, dan mendeteksi adanya kecurangan dan korupsi. Anggota BKM mengharapkan bahwa pelaksanaan audit oleh auditor sebagai pembinaan untuk penyusunan laporan keuangan BKM lebih baik dan tidak mencari kesalahan pada BKM.

Memberikan keyakinan bahwa organisasi telah digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dana BLM telah dicairkan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPB). Memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan telah dilakukan dengan benar sesuai dengan Sistem dan Prosedur keuangan yang telah ditetapkan oleh program. Audit mencakup juga kepatuhan kepada kebijakan dan prosedur penggunaan dana, serta pembukuan yang dibuat untuk menjamin akuntabilitas dari laporan keuangan yang disajikan.

Dengan harapan pelaku agar auditor dapat memberikan pembinaan terhadap Efektifitas pengendalian intern BKM/LKM (Sekretariat) dan UPK atas pengelolaan keuangan dan penggunaan dana. Pengukuran Sistem Pengendalian Internal Sekretariat dan UPK dapat menggunakan, Format Pengukuran Kinerja Sekretariat dan UPK Kepatuhan terhadap 1). Pedoman operasional (PNPM-Perkotaan), peraturan, kebijakan program, 2). Anggaran Dasar

BKM, dan Keputusan Rapat Anggota BKM, yang terekam dalam Notulen Rapat. Ketaatan atas aturan secara langsung terekam dalam transaksi dan material berdampak pada keuangan dalam laporan keuangan BKM/LKM dan UPK. Penilaian atas laporan keuangan Sekretariat BKM/LKM dan UPK.

Program audit harus meliputi prosedur yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap kelayakan kesalahan penyajian yang material. Auditor harus memenuhi standar pemeriksaan auditor yang berlaku di Indonesia. Cakupan audit termasuk mempertimbangkan risiko material kesalahan penyajian laporan keuangan. Pelaksanaan audit mencakup, Seluruh sumber dana yang diterima dana oleh BKM/LKM dan pihak terkait serta pemanfaatannya oleh BKM/LKM dan semua pihak pelaksana kegiatan. Audit dilakukan untuk satu tahun buku (Januari-Desember). Setiap penyimpangan material atas pelaporan keuangan BKM/LKM dan pihak terkait beserta dampaknya akan disajikan dalam laporan audit. Penilaian terhadap laporan keuangan sekretariat BKM/LKM yaitu laporan arus kas (cash flow) dan penilaian terhadap laporan keuangan UPK yaitu Neraca dan Laba Rugi. Penilaian atas efektifitas pengendalian internal yang berdampak pada laporan keuangan. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan pencairan dan pemanfaatan dana. Verifikasi mencakup, Penggunaan dana yang diperoleh BKM/LKM dan pihak terkait yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPB). Seluruh pengeluaran harus didukung dengan dokumen-dokumen yang sah. Penyimpanan semua dokumen pendukung, catatan, dan buku-buku disimpan dengan layak sebagai bagian dari kepatuhan.

Kesesuaian pengeluaran BKM/LKM dengan rekening bank BKM/LKM dan kesesuaian penerimaan dan pengeluaran UPK dengan rekening bank terhadap KSM dan pemanfaat kegiatan. Uji Petik/Sampel ke KSM merujuk kepada semua jenis KSM. KSM yang KSM Ekonomi, KSM Infrastruktur dan KSM sosial. Uji petik ini meliputi konfirmasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh KSM termasuk verifikasi atas keberadaan KSM pelaksana kegiatan, nilai kegiatan yang dibiayai, ketepatan sasaran dan lokasi kegiatan (cek fisik lapangan) dan pemanfaatan.

Pola pembinaan Auditor Independen ini berdampak pada pengaktifan program yang akan berdampak pada Program PNPM -MP yang dilaksanakan di Kota Bandung.

KESIMPULAN

1. Masih adanya asumsi dari pelaku PNPM-MP yaitu BKM yang memandang tugas auditor hanya sebatas pada pelaksanaan investigasi terhadap kinerja BKM, sehingga terkesan para BKM melakukan pertanggungjawaban karena adanya audit bukan karena motivasi intrinsik bahwa pertanggungjawaban kinerja adalah hal yang semestinya dilakukan.
2. Adanya auditor independen yang tidak terikat dengan intervensi pemerintah dalam prakteknya juga melakukan pola mentoring atau pembinaan sehingga dimungkinkan para BKM nantinya juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman bagaimana bekerja yang akuntabel.
3. Pola pembinaan yang dilakukan oleh auditor independen bukan hanya dapat memberikan wawasan pengetahuan dan pemahaman pada para BKM supaya mampu bekerja akuntabel, melainkan juga akan berdampak pada efektivitas pelaksanaan PNPM-MP di Kota Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Makalah PNPM-MP.
- Tambunan, T T.H. 2003. Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sie Infokum Ditama Binbangkum. 2011. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
- Puslitbang Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.
- Wijayanto, D. 2012. Pengantar Manajemen. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, A. 2008. Auditing: Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. Jilid 1 Edisi keempat. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Jusup, A.H. 2001. Auditing. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2011. Kumpulan Bahan Bacaan Pelatihan Dewan Pengawas Tahun 4 PNPM Mandiri Perkotaan.
- Madura, J. 2009. Pengantar Bisnis. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarni dan J. Soeprihanto. 2000. Pengantar Bisnis: Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan. Edisi kelima. Yogyakarta: Liberty.